

Keberlanjutan Pola Penggaduhan Ternak Sapi Potong pada Tingkat Kelompok Tani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

(Sustainability of Cattle Sharing Patterns on Farmer Groups Level in Mukomuko Regency, Bengkulu Province)

Ishak A, Firison J, Harwanto

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, PO Box 1010 BKL, Bengkulu 38119
erhr94@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Cattle sharing patterns in Mukomuko done by utilizing government social grants with the aim of improving the livestock population and farmers income. One of the key success factors of sharing patterns sustainability of the livestock is institutional factors. This study aimed to analyze the sustainability of cattle sharing patterns on farmer groups level in Mukomuko regency. The study was conducted in January 2017 in three farmer groups in three villages, *i.e.* (a) Sumber Makmur village, Lubuk Pinang subregency; (b) Tirta Mulya village, Air Manjuntjo subregency; and (c) Pauh Terenja village, XIV Koto subregency. The data collected is focused on cattle sharing patterns in the development of livestock. Data were collected through focus group discussion (FGD) and individual interviews involving 24 respondents *i.e.* farmers dan extension agents. Data were analyzed descriptively. The study concluded that: (a) cattle sharing program through social grants from the government is able to increase the cattle ownership by farmers, (b) the number of cattles owned by farmer groups tend to decrease with increasing the number of cattles owned by farmers, and (c) cooperative livestock capable of ensuring the sustainability cattle sharing patterns on the farmer group level.

Key Words: Cattle, Sharing Patterns, Livestock Cooperation

ABSTRAK

Penggaduhan ternak sapi potong di Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan memanfaatkan bantuan sosial pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus pendapatan petani. Salah satu faktor kunci keberlanjutan penggaduhan ternak tersebut adalah faktor kelembagaan yaitu manajemen kelompok tani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan pengembangan populasi ternak sapi potong melalui pola penggaduhan ternak pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017 di tiga kelompok tani penggaduh sapi potong, masing-masing di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang; Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo; dan Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto. Data yang dikumpulkan adalah manajemen pola penggaduhan ternak dalam pengembangan ternak. Data dikumpulkan melalui wawancara kelompok (FGD), wawancara individu dengan melibatkan 24 orang responden yaitu petani penggaduh dan penyuluh lapangan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Program penggaduhan sapi potong melalui dana bantuan sosial dari pemerintah mampu meningkatkan kepemilikan jumlah ternak sapi milik petani; (2) Jumlah sapi milik kelompok cenderung semakin menurun dengan meningkatnya jumlah sapi milik petani; dan (3) Kelembagaan koperasi ternak mampu menjamin keberlanjutan pola penggaduhan ternak sapi milik kelompok.

Kata Kunci: Sapi Potong, Pola Penggaduhan, Koperasi Ternak

PENDAHULUAN

Ternak sapi potong adalah salah satu komoditas peternakan yang penting artinya bagi perekonomian rumah tangga petani di perdesaan. Meskipun umumnya tidak diarahkan

sebagai sumber penghasilan utama keluarga, namun sapi potong menjadi tabungan keluarga petani yang diusahakan dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia di sela-sela usaha tani di lahan pertanian.

Pemerintah terus mendorong usaha pengembangan sapi potong melalui berbagai bentuk program bantuan ternak kepada petani. Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan daging di dalam negeri. Konsumsi daging sapi Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat (Pusdatin 2015). Pada tahun 1993, konsumsi daging sapi rata-rata penduduk Indonesia hanya 0,704 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 2,36 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging sapi nasional khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta belum dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga setiap tahun pemerintah masih melakukan impor. Impor daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 246.609 ton.

Pengembangan ternak sapi potong telah dimulai sejak awal Orde Baru dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak dan produksi daging sekaligus meningkatkan pendapatan peternak sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Melalui UU ini, pemerintah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan baik peternakan skala besar yang dilakukan oleh perusahaan peternakan, maupun usaha peternakan rakyat yang dilakukan oleh para petani.

Jumlah sapi potong di Indonesia pada tahun 2016 adalah 16.092.561 ekor (BPS 2016). Lebih dari 90% diantaranya adalah usaha peternakan rakyat (Widiati, 2014). Oleh karena itu, perbaikan kelembagaan usaha peternakan rakyat seharusnya menjadi perhatian utama dalam upaya pengembangan populasi ternak nasional. Widiati (2014) mengusulkan agar perlu adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mendukung pengembangan usaha sapi potong. Suryana (2009) mengajukan kegiatan usaha tani terpadu yang mencakup beberapa komoditas, seperti integrasi tanaman – ternak atau tanaman – ternak – ikan. Sementara itu, Siregar dan Ilham (2003) mengusulkan adanya kemitraan secara vertikal dan horisontal dalam usahatani ternak. Kemitraan secara vertikal dapat ditempuh melalui kerjasama antara peternak dengan perusahaan, sedangkan integrasi horisontal dapat dilakukan oleh peternak secara bersama-sama dalam wadah koperasi atau organisasi lainnya. Mayulu *et al.* (2010) mengusulkan agar pemerintah menyerahkan model pengembangan sapi potong yang berbasis masyarakat dan hanya berperan dalam pelayanan dan membangun kawasan peternakan.

Banyak kisah keberhasilan program pengembangan ternak sapi potong yang telah dilakukan oleh pemerintah. Usaha ternak sapi potong di Indonesia sudah cukup efisien baik dari segi profitabilitas usaha maupun keunggulan komparatif, demikian juga kemitraan usaha mampu meningkatkan keuntungan peternak (Suryana, 2009). Berbagai program gaduhan sapi mampu meningkatkan pendapatan peternak dan jumlah populasi sapi (Sonbait *et al.* 2011; Djaelani *et al.*, 2009; Wibowo dan Sumanto, 2013; Amalo *et al.*, 2012).

Pengembangan peternakan sapi potong rakyat dilakukan melalui fasilitas pemerintah dari berbagai macam program, di antaranya adalah bantuan ternak, inseminasi buatan, pencegahan pemotongan induk betina produktif, integrasi tanaman ternak, pengembangan pupuk organik dan biogas, pengembangan teknologi pakan dan lahan pakan, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak lain diarahkan untuk peningkatan populasi sapi potong dan pendapatan petani ternak. Namun yang paling penting dan mungkin paling sulit dilakukan pemerintah adalah mengembangkan partisipasi petani itu sendiri untuk memperbaiki kelembagaan kelompok yang sesuai dalam pengembangan usaha ternaknya. Hal ini karena pengaruh kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam sehingga menyulitkan pemerintah membuat satu program yang seragam dan cocok

dalam pengembangan kelembagaan petani ternak di seluruh kawasan sentra produksi ternak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan pengembangan populasi ternak sapi potong melalui pola penggaduhan ternak pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2017 pada tiga kelompok tani di Kabupaten Mukomuko, yaitu: (1) Kelompok Tani Harapan Maju, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, (2) Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo, dan (3) Kelompok Ternak Harapan Jaya, Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto. Ketiga kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan ternak sapi potong dari pemerintah dan digaduhkan dengan sistem yang berbeda. Pada Kelompok Tani Harapan Jaya, pola penggaduhan sapi dilakukan pada saat penelitian melalui Koperasi Ternak, sedangkan dua kelompok tani lainnya pola penggaduhan sapi dilakukan melalui kelompok.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kelompok atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara individu melibatkan 24 orang responden. Data yang dikumpulkan terkait dengan manajemen pola penggaduhan ternak, yaitu pola penggaduhan ternak sapi yang difasilitasi melalui bantuan pemerintah dan pola penggaduhan ternak sapi pada level kelompok tani dan keberlanjutannya. FGD dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok tani dengan melibatkan 7 orang petani (pengurus dan penggaduh ternak). Sementara wawancara individu dilakukan terhadap 3 orang penyuluh pertanian yang bertugas di masing-masing desa. Fokus wawancara dan diskusi diarahkan pada pola penggaduhan ternak sapi potong dan pengembangan ternak di tingkat kelompok tani. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan membandingkan keberlanjutan sistem penggaduhan ternak sapi potong dengan pola yang berbeda pada level kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mukomuko adalah kabupaten sentra penghasil sapi potong terbesar dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurut data BPS Provinsi Bengkulu (2016), jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Mukomuko terus berkembang dengan pesat dari 7.638 ekor (9,5% populasi ternak sapi potong di Provinsi Bengkulu) pada tahun 2004 menjadi 21.743 ekor pada tahun 2015 (22,65%). Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Mukomuko tersebar merata pada 15 kecamatan di seluruh wilayah kabupaten. Hal ini menyiratkan bahwa usaha peternakan sapi memiliki arti penting bagi rumah tangga petani karena banyak diusahakan petani pada berbagai wilayah di Mukomuko.

Peningkatan populasi ternak sapi potong diinisiasi oleh bantuan ternak sapi dari pemerintah yang dipelihara petani dengan sistem gaduhan, khususnya pada wilayah yang penduduknya berasal dari etnis Jawa yang datang ke Mukomuko sebagai transmigran. Memelihara sapi memang telah menjadi budaya orang Jawa karena fungsinya yang erat dengan budidaya tanaman pangan, khususnya padi. Sapi dipelihara karena berbagai manfaat ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja membajak sawah dan sumber protein hewani yang dapat dimanfaatkan atau dijual sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan (sebagai tabungan). Sapi dipelihara karena dapat diintegrasikan dengan tanaman.

Pemeliharaan sapi dilakukan petani sebagai usaha sampingan dengan memanfaatkan waktu luang di sela-sela kegiatan usaha pertanian utama di lahan usahatani, yaitu bersawah dan berkebun kelapa sawit. Oleh karena itu, jumlah kepemilikan ternak sangat tergantung

dengan ketersediaan waktu luang petani. Petani yang bersawah dan berkebun kelapa sawit memelihara sapi lebih sedikit yaitu rata-rata 2 ekor dibandingkan dengan petani yang hanya memiliki kebun kelapa sawit mampu memelihara sapi dengan rata-rata 4 ekor.

Pola penggaduhan ternak sapi potong

Penggaduhan ternak sapi potong di Kabupaten Mukomuko adalah bentuk kemitraan antara pemilik ternak dengan pemelihara (penggaduh) ternak. Ternak yang digaduh berasal dari pemerintah (Dinas Peternakan) atau ternak milik kelompok tani.

Pola penggaduhan ternak melalui fasilitas program pemerintah

Pola penggaduhan ternak sapi potong melalui program pemerintah merupakan program bantuan sosial (bansos) dalam bentuk inisiasi pengembangan ternak sapi. Bantuan ternak sapi pertama dari pemerintah pada tahun 1991 dari Proyek IFAD (*International Fund for Agricultural Development*), yaitu bantuan 11 ekor sapi (10 betina, 1 pejantan) kepada setiap dusun di daerah transmigrasi yang berkeinginan menggaduh sapi.

Syarat menjadi penggaduh sapi dalam Proyek IFAD cukup sederhana. Para penggaduh berkewajiban membuat kandang dan “menyetorkan” dua ekor sapi lepas sapih (umur 7 bulan) kepada pemerintah (petugas peternakan) yang kemudian akan digaduhkan kembali kepada petani lain yang beminat. Setelah menyetorkan sapi, induk yang diterima akan menjadi milik penggaduh. Petani yang menggaduh sepasang sapi (jantan dan betina), wajib mengembalikan dua ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan umur 7 bulan. Program sapi IFAD bertahan beberapa tahun dan menjadi cikal bakal pengembangan sapi di Kabupaten Mukomuko.

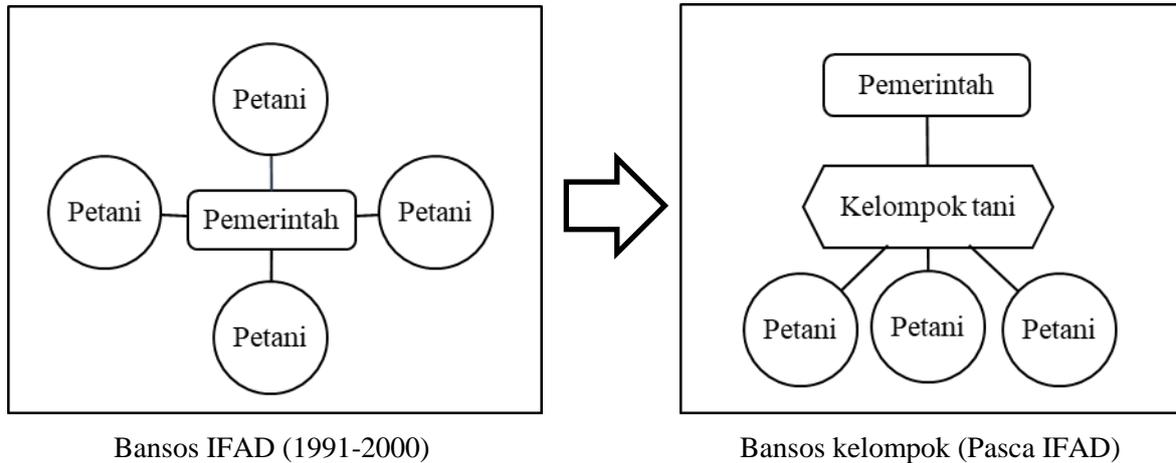
Sistem bansos penggaduhan ternak sapi setelah masa proyek sapi IFAD mengalami perubahan. Bantuan sapi diberikan untuk kelompok tani. Perjanjian kemitraan dilakukan antara pemerintah dengan kelompok penggaduh. Apabila pada proyek sapi IFAD, perguliran sapi dilakukan oleh petugas peternakan, maka program bansos ternak kepada kelompok tani mewajibkan kelompok menggulirkan hasil pengembangan ternak gaduhannya. Sapi bantuan pemerintah akan tetap merupakan milik kelompok, tidak akan menjadi milik penggaduh (Tabel 1). Hubungan antara pemerintah sebagai penanggung jawab program dan petani sebagai penggaduh ternak sapi telah berubah dari pengawasan langsung menjadi pengawasan melalui kelompok, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Fasilitas pemerintah dalam pengembangan sapi potong di lokasi penelitian

Bansos sapi	Kelompok penerima	Tahun awal bansos	Jumlah sapi bantuan	
			Sapi dara	Sapi pejantan
Sapi IFAD	Petani (per dusun)	1991	10	1
Sapi kelompok	Kelompok Tani Harapan Maju, Desa Sumber Makmur	2010	23	2
	Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Pauh Terenja	2005	45	5
	Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Tirta Mulya	2008	20	2

Gambar 1 memperlihatkan perubahan pola hubungan antara pemerintah dengan petani penggaduh sapi. Pada bansos Sapi IFAD, hubungan kemitraan antara pemerintah dengan petani dilakukan secara langsung. Setelah Proyek IFAD selesai, hubungan pemerintah

dengan penggadu dimediasi oleh kelompok tani, sehingga peran kelompok menjadi lebih penting artinya dalam menunjang keberhasilan program pengembangan sapi. Sistem penggadahan melalui kelompok dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan pengembangan ternak secara partisipatif.



Gambar 1. Perubahan pola hubungan pemerintah dengan petani dalam penggadahan ternak sapi di Kabupaten Mukomuko

Pola penggadahan ternak milik kelompok tani

Pola penggadahan ternak sapi potong milik kelompok adalah upaya meneruskan pengembangan ternak yang dilakukan pemerintah melalui program bansos ternak sapi yang telah dilakukan sebelumnya. Pola penggadahan ternak milik kelompok tani agak berbeda dengan bansos pemerintah. Program bansos hanya fokus pada pembiakan ternak. Sementara itu, penggadahan ternak milik kelompok dilakukan selain untuk tujuan pembiakan, juga untuk tujuan penggemukan. Sapi yang digaduhkan kelompok tani adalah sapi dara, sapi betina induk, dan sapi jantan.

Sistem bagi hasil ternak sapi gaduhan berbeda-beda tergantung pada kesepakatan kelompok. Untuk sapi dara, anak pertamanya akan menjadi milik penggadu, sementara itu anak kedua dan selanjutnya dibagi menurut persentasi sesuai kesepakatan. Anak dari sapi betina induk dan hasil penjualan gaduhan sapi jantan juga dibagi menurut kesepakatan (Tabel 2).

Terlihat pada Tabel 2 bahwa terdapat tiga sistem bagi hasil antara penggadu dan kelompok tani. Ada yang lebih menguntungkan penggadu atau kelompok, namun ada juga yang keuntungannya dibagi rata antara penggadu dan kelompok. Pada Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Pauh Terenja, pembagian hasil gaduhan sapi lebih menguntungkan kelompok tani yaitu sebesar 55% dari penjualan atau taksiran harga pasar sapi diperuntukkan untuk kelompok tani, sedangkan penggadu hanya mendapatkan 45%. Hal ini menyebabkan jumlah sapi milik kelompok akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada kelompok lainnya, yaitu 70:30 (Kelompok Tani Harapan Maju, Desa sumber Makmur) dan 50:50 (Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Tirta Mulya).

Tabel 2. Sistem bagi hasil gaduhan sapi antara kelompok dan petani penggaduh

Tujuan penggaduhan	Sistem bagi hasil antara penggaduh dan kelompok tani pada lokasi penelitian		
	Harapan Maju, Desa Sumber Makmur	Mekar Sari, Desa Tirta Mulya	Harapan Jaya, Desa Pauh Terenja
Pembiakan Sapi dara	--- Anak pertama milik penggaduh ---		
	Anak kedua dan seterusnya dibagi dengan persentasi 70:30	Anak kedua dan seterusnya dibagi dengan persentase 50:50	Anak kedua dan seterusnya dibagi dengan persentasi 45:55
Sapi betina induk	Anak dibagi dengan persentasi 70:30	Anak dibagi dengan persentase 50:50	Anak dibagi dengan persentasi 45:55
Penggemukan	Hasil penjualan dibagi dengan persentasi 70:30 setelah dikurangi harga sapi saat awal penggaduhan	Hasil penjualan dibagi dengan persentase 50:50 setelah dikurangi harga sapi saat awal penggaduhan	Hasil penjualan dibagi dengan persentasi 45:55 setelah dikurangi harga sapi saat awal penggaduhan

Keberlanjutan pola penggaduhan ternak sapi milik kelompok tani

Jumlah ternak sapi milik kelompok tani selama masa pembinaan program pemerintah cenderung terus bertambah karena sistem perguliran sapi gaduhan terus berjalan. Tingginya minat petani menggaduh ternak semakin menurun ketika jumlah sapi individu petani telah mencapai jumlah optimal yang mampu dipelihara petani, yaitu dengan rataan antara 2-4 ekor per KK (Tabel 3). Menurunnya minat tersebut menyebabkan pengurus kelompok tani kesulitan menggaduhkan sapi milik kelompok.

Tabel 3. Hubungan antara kepemilikan sapi dengan minat petani menggaduh ternak kelompok.

Kepemilikan sapi rata-rata petani (ekor)	Minat menggaduh ternak			
	Tidak berminat	Rendah	Sedang	Tinggi
0				√
1				√
2			√	
3		√		
>3	√			

Kesulitan kelompok tani menggaduhkan sapi menyebabkan jumlah ternak sapi milik kelompok semakin berkurang karena “terpaksa” harus dijual. Hal ini karena secara kelembagaan, kelompok penggaduh sapi tidak dituntut dan dibina untuk pengembangan ternaknya pada saat awal mendapatkan sapi bansos dari pemerintah. Hal yang penting selama pelaksanaan program bansos berlangsung adalah jumlah populasi ternak meningkat sebagai indikator dampak keberhasilan program penggaduhan ternak sapi tersebut. Dengan kata lain, kelompok dinilai berhasil apabila jumlah ternak yang dipelihara petani anggota meningkat pada saat program berlangsung. Padahal kegiatan penggaduhan sapi milik

kelompok seharusnya dirancang untuk terus berjalan setelah program selesai sehingga populasi sapi milik kelompok juga terus bertambah (Tabel 4).

Tabel 4. Perbandingan jumlah sapi milik kelompok pada saat awal program bansos dan pada saat penelitian

Kelompok tani	Jumlah sapi kelompok pada awal bansos (ekor)			Jumlah rata-rata sapi milik petani pada Januari 2017 (ekor)	Jumlah sapi milik kelompok pada Januari 2017 (ekor)	
	Tahun	Sapi pejantan	Sapi dara		Jantan	Betina
Harapan Maju	2010	2	23	3	3	12
Mekar Sari	2008	2	20	2	-	7
Harapan Jaya	2005	5	45	4	52	55

Hal menarik yang terlihat pada Tabel 4 adalah di Kelompok Tani Harapan Maju dan Mekar Sari jumlah sapi kelompok semakin menurun, namun sebaliknya di Kelompok Tani Harapan Jaya jumlah sapi kelompok semakin meningkat dari 50 ekor pada tahun 2005 (awal bansos) menjadi 107 ekor pada tahun 2017. Peningkatan jumlah sapi di Kelompok Tani Harapan Jaya tersebut tidak lepas dari peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan di tingkat kelompok tani.

Pada tahun 2010, ketika minat anggota menggaduh sapi kelompok semakin menurun, Kelompok Tani Harapan Jaya mendirikan Koperasi Ternak yang beranggotakan seluruh anggota kelompok tani yaitu sebanyak 25 orang. Koperasi tersebut mengkoordinasikan kegiatan simpan pinjam dan penggaduhan sapi. Setiap awal tahun dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi sebagai ajang pelaporan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan perencanaan kegiatan usaha koperasi tahun berjalan. Oleh karena itu, seluruh anggota mengetahui perkembangan populasi ternak sapi milik kelompok dan dapat merencanakan pola penggaduhan ternak yang tepat untuk pengembangan ternak dan sekaligus meningkatkan keuntungan koperasi.

Kelompok Tani Harapan Jaya menerapkan dua pola penggaduhan ternak, yaitu penggaduhan ternak di dalam kelompok dan di luar kelompok dengan sistem bagi hasil yang berbeda. Penggaduhan ternak di dalam kelompok dengan persentasi bagi hasil antara penggaduh dan kelompok adalah 45%:55%, sementara itu di luar kelompok 50%:50%. Sekitar 60% jumlah sapi kelompok digaduhkan kepada petani di luar kelompok.

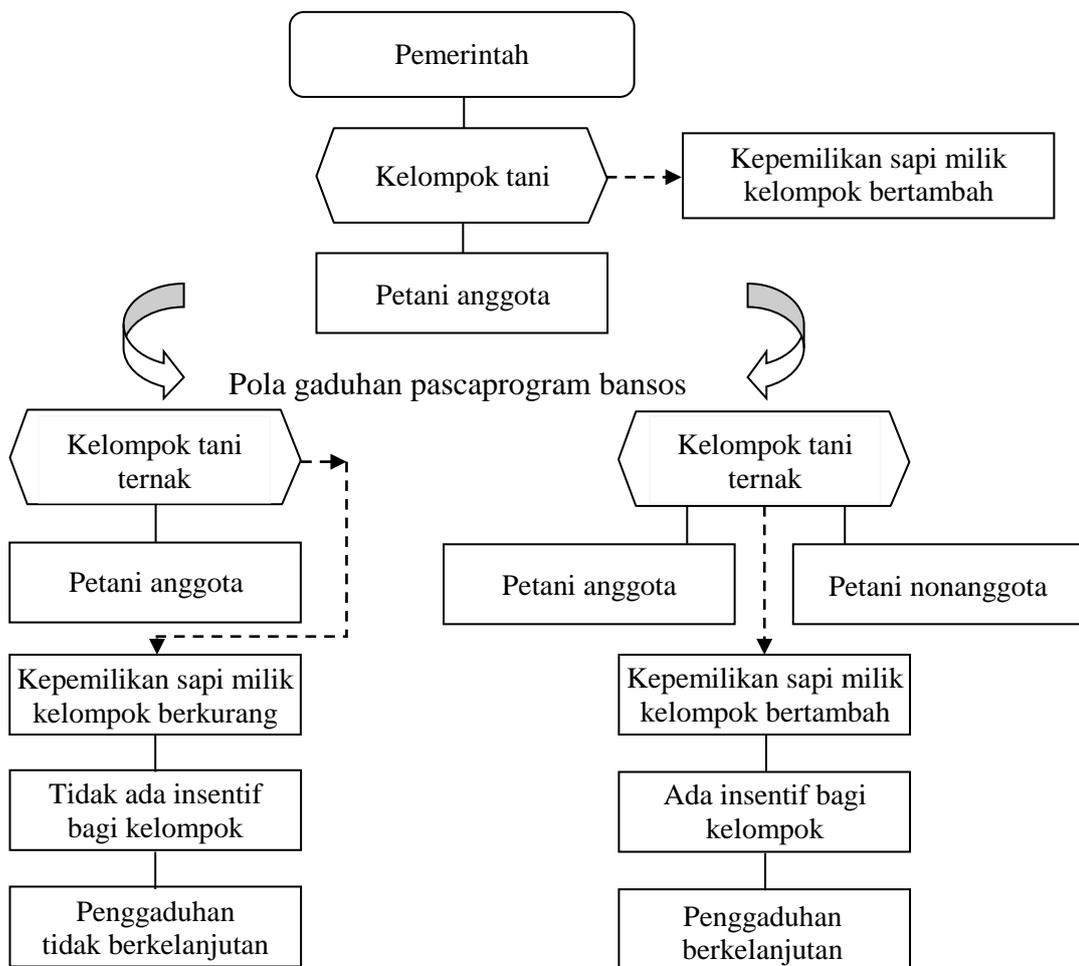
Keuntungan koperasi dari hasil penggaduhan sapi dibagi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Sebanyak 50% keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi dibagi kepada pengurus dan anggota. Sebagai gambaran, keuntungan Pada tahun 2016 diperoleh keuntungan sekitar Rp 54.000.000, sebanyak 50% diantaranya dibagi kepada pengurus dan anggota koperasi pada saat RAT di bulan Januari 2017, sedangkan 50% keuntungan lainnya diperuntukkan bagi penambahan modal dan biaya sosial. Dari 50% keuntungan yang dibagi tersebut, pengurus menerima sebagiannya dan anggota menerima sisanya sesuai dengan jasa usahanya. Adanya insentif kepada pengurus dan anggota dalam pengelolaan koperasi ternak pada Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Pauh Terenja telah menimbulkan semangat kelompok tani untuk terus mengembangkan populasi ternak milik kelompok melalui pola penggaduhan ternak.

Dari keterangan di atas, insentif menjadi kata kunci dalam pengembangan kelembagaan penggaduhan ternak yang dimiliki kelompok tani. Ketika program bansos telah selesai, pengawasan pemerintah terhadap program pengembangan ternak sapi berakhir. Oleh karena itu, kelompok tani dituntut untuk berperan aktif mengembangkan jumlah ternak sapi yang dimilikinya. Dengan kata lain, peran pemerintah harus mampu

digantikan oleh pengurus kelompok. Disinilah insentif bagi pengurus kelompok menjadi sesuatu yang penting diperhatikan.

Pada kelompok yang tidak memiliki koperasi ternak, peran kelompok juga akan berakhir pada saat program bansos berakhir. Keberlanjutan penggaduhan ternak milik kelompok semakin sulit dilaksanakan karena jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok sudah cukup memadai. Hal ini menyebabkan pengurus dan anggota kelompok tidak lagi berkepentingan untuk mengembangkan ternak sapi milik kelompok. Tidak ada insentif yang mereka peroleh dari upaya itu.

Pembentukan koperasi ternak memberikan manfaat ekonomi bukan hanya bagi anggota kelompok tani yang sekaligus merupakan anggota koperasi, tetapi juga kepada petani secara umum (petani non-anggota) yang ingin menggaduh sapi. Pengurus kelompok akan berupaya terus mengembangkan jumlah ternak sapi milik kelompok kepada petani non anggota kelompok karena ada insentif ekonomi yang diperoleh koperasi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pola penggaduhan sapi melalui koperasi ternak mampu meningkatkan jumlah ternak milik kelompok sehingga menjamin keberlanjutan sistem penggaduhan ternak pada level kelompok tani (Gambar 2).



Gambar 2. Keberlanjutan pola penggaduhan ternak sapi pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Mukomuko

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penggaduhan sapi potong melalui dana bantuan sosial dari pemerintah mampu meningkatkan jumlah sapi milik petani yang sebelumnya belum memiliki sapi menjadi memiliki sapi dengan rata-rata 2-4 ekor per KK. Peningkatan jumlah kepemilikan sapi petani menurunkan minat petani menggaduh sapi kelompok, namun melalui pengembangan kelembagaan kelompok tani menjadi koperasi ternak. Jumlah populasi sapi milik kelompok tetap terus berkembang setelah program bantuan sosial selesai. Sistem penggaduhan ternak berlangsung secara berkelanjutan dengan adanya insentif dari koperasi ternak yang memotivasi pengurus dan petani anggota koperasi ternak untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan pola penggaduhan ternak sapi pada level kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalo S, Hartono B, Utami HD. 2012. Model simulasi peningkatan ternak sapi induk pola gaduhan terhadap curahan tenaga kerja: studi kasus di Kecamatan Amanuban Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Sains Peternakan*. 10(1):30-38.
- BPS. 2016. Populasi sapi potong menurut provinsi, 2009-2016 [Internet]. [cited 2 Februari 2017]. Available from: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1016>.
- Djaelani S, Widiati R, Santosa KA. 2009. Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kabupaten Maluku Utara. *Buletin Peternakan*. 33(1):40-48.
- Mayulu H, Sunarso, Sutrisno CI, Sumarsono. 2010. Kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*. 29(1):34-41.
- Pusdatin. 2015. Outlook komoditas pertanian sub sektor peternakan – daging sapi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Siregar M, Ilham N. 2003. Upaya peningkatan efisiensi usaha ternak ditinjau dari aspek agribisnis yang berdaya saing. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 21(1):57-66.
- Sonbait LY, Santosa KA, Panjono. 2011. Evaluasi program pengembangan sapi potong gaduhan melalui kelompok lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *Buletin Peternakan*. 35(3):208-217.
- Suryana. 2009. Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan. *Jurnal Litbang Pertanian*. 28(1):29-37.
- Wibowo B, Sumanto. 2013. Pola budidaya dan gaduhan usaha sapi potong di kawasan perkebunan sawit rakyat di Provinsi Lampung. Dalam Purwantari ND, Saepulloh M, Iskandar S, Anggraeni A, Ginting SP, Priyanti A, Wiedosari A, Yulistiani D, Inounu I, Bahri S, Puastuti W, penyunting. *Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Berbasis Sumberdaya Lokal yang Adaptif dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2013. Medan, 3-4 September 2013. Bogor: Puslitbangnak. hal. 259-267.
- Widiati R. 2014. Membangun industri peternakan sapi potong rakyat dalam mendukung kecukupan daging sapi. *Wartazoa*. 24(4):191-200.

DISKUSI

Pertanyaan

1. *Makalah ini bisa menjadi rekomendasi penting ketika sapi diberikan sebagai bantuan saja agar tidak langsung habis, sehingga perlu surat perjanjian agar sapi bantuan dapat berkembang. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk dapat meningkatkan populasi?*
2. *Bagaimana kiat-kiat agar petani gaduhan memahami bahwa dengan menjadi anggota koperasi menjadi lebih baik?*

Jawaban

1. *Surat perjanjian dapat menjadi jaminan, tetapi pada lokasi tertentu sulit diterapkan. Sistem gaduhan dengan pembagian antara pemilik dan penggaduh sebaiknya ada hitungan ekonomi sehingga bisa berkelanjutan (perlu analisis lanjutan). Petugas di lapang harus pandai meyakinkan bahwa bila populasi meningkat maka sapi gaduhan tetap menguntungkan.*
2. *Kiat-kiat yang penting bagaimana petani mendapat keuntungan dengan menggunakan peran ketua adat. Apabila usaha gaduhan sudah menguntungkan maka akan diikuti oleh petani lainnya.*